

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu sekumpulan kelompok maupun individu yang mendiami suatu wilayah dan memiliki organisasi yang digerakan oleh pemerintahan yang sah, dan memiliki kedaulatan. Negara bisa disebut juga sebagai suatu wilayah yang memiliki aturan-aturan yang mengikat dan berlaku bagi seluruh individu yang di wilayah tersebut. Berdirinya suatu negara memerlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan visi dan misi dari negara tersebut agar mampu berjalan sesuai dengan keinginan individu dalam negara tersebut. secara umum plato dan aristoteles dalam teori pemerintahannya membagi bentuk pemerintahan kedalam tribagian (*tripartite clasification*). Menurut plato bahwa tiga bentuk pemerintahan terbaik secara berturut-turut ialah Kerajaan, Aristokrasi dan Demokrasi. Bentuk pemerintahan akan merosot akan memunculkan tirani, bentuk pemerintahan aristokrat akan merosot akan memunculkan oligharki, dan jika pemerintahan demokrasi merosot akan memunculkan mookrasi (Andriyan, 2016, hlm.58).

Demokrasi oleh beberapa negara mempercayai bahwa dengan mengaplikasikan bentuk pemerintahan demokrasi, negara tersebut akan maju menjadi negara yang sejahtera dan makmur walaupun ada beberapa negara yang tidak meyakini bentuk pemerintahan demokrasi akan menjadi kunci menuju kesejahteraan, setidaknya Amerika Serikat menjadi bukti bahwa Amerika Serikat sebagai negara demokrasi cukup berhasil menjadi negara *superpower* walaupun ada beberapa faktor lainnya yang menyokong Amerika Serikat untuk menjadi negara besar.

Dalam negara demokrasi diantaranya dicirikan oleh : *freedom of prees and speech, freedom of assembly, popular sovereignty, political freedom, civil right, religious freedom, freedom of movement, economic opportunity, equal education opportunity* (Cunningham, 2002, Hlm.2). Demokratisasi sendiri merupakan bentuk nyata dari demokrasi itu sendiri dengan adanya gerakan-gerakan civil society, seperti LSM dan Ormas menjadi salah satu aspek pendukung demokratisasi, yang juga berfungsi sebagai pengontrol dan pengawas jalannya pemerintahan hasil bentukan pemilu yang demokratis.

Perjalanan demokratisasi di Korea Selatan tidak lepas dari peran buruh yang membuka gerakan menuju keadilan dalam perekonomian dan politik. Sampai tahun 1960-an, sekitar 65% penduduk di Korea Selatan merupakan pekerja di bidang pertanian dan perikanan. Karena pada saat itu mereka belum mampu untuk memiliki modalnya sendiri, mereka pada akhirnya harus mendekati kekuatan politik untuk memperoleh bantuan modal dan barang-barang import lainnya sehingga secara tidak langsung dalam hal ekonomi, mereka masih bergantung kepada negara dan negara menguasai masyarakat sipil secara total, dalam hubungan penguasa seperti ini masyarakat sipil tidak memiliki kekuatan di bidang politik. Pada tahun 1970-an, masyarakat sipil di Korea Selatan mulai berusaha untuk memperjuangkan secara langsung kedudukannya terhadap negara dengan alasan sangat besarnya kekuasaan negara dan masalah ketidakadilan penguasaan kekayaan nasional. Masyarakat sipil juga berusaha untuk menunjukkan sifat ketidakadilan dalam menentang rezim diktator pada saat itu (Yoon, 2003, hlm.51).

Terdapat sejumlah faktor dibalik keberhasilan demokratisasi di Korea Selatan menurut Yang Seung Yoon (2003, hlm. 52-53) diantaranya adalah, pertama, unsur-unsur sosio-ekonomi. Sejak tahun 1980-an kelas menengah Korea semakin bertambah besar dan struktur sosial yang ada di Korea semakin bervariasi. Dalam usaha pembentukan kembali sosial masyarakat Korea, kelas menengah mulai menempati posisi yang layak diperhitungkan, sementara itu kelas perburuhan juga semakin bertambah besar dan berkembang menjasi kekuatan anti-sistem yang ada.

Kedua, unsur-unsur psikologis. Industrialisasi, urbanisasi, meluasnya media massa, pertambahan tinggi taraf pendidikan, internasionalisasi dan sebagainya telah mengakibatkan kesadaran politik rakyat Korea Selatan semakin mengarah pada kestabilan. Semua rakyat negara harus secara bersama mencapai tingkat kenegaraan yang maju. Dengan telah tercapainya tingkat kemajuan tersebut secara otomatis demokratisasi harus dikembangkan.

Ketiga, unsur-unsur politik. Sejak tahun 1980-an, kemunculan tokoh-tokoh politik baru Korea yang tidak lagi bersifat ortodoks mulai menggeser sifat otoriter politikus lama. Sementara itu, di luar sistem politik Korea terdapat suatu kekuatan yang disebut *Jaeya* yang berarti 'berada di lapangan terbuka', suatu kekuatan yang pernah menjadi korban kesewenangan pemerintah dan memperluas ruang lingkup

aksinya. *Jaeya* kemudian berkembang secara pesat sebagai kekuatan politik.

Keempat, unsur lingkungan masyarakat internasional. Sejak tahun 1980-an, di negara-negara dunia ketiga sering terjadi perubahan politik yang disebabkan karena mulai melemahnya pengaruh Uni Soviet dan ikut terguncangnya negara-negara Blok Komunis Eropa Timur. Disamping itu, negara-negara benua Afrika dan Asia yang sampai saat itu menjadi bagian dari kekuatan politik Internasional lama, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga mulai terkena dampaknya. Kecenderungan perubahan yang terjadi di masyarakat internasional itu dengan segera dan secara tegas memberikan pengaruh bagi proses demokratisasi di Korea Selatan.

Pada tahun 1970, terjadi suatu pergerakan buruh untuk menuntut Undang-Undang perburuhan di Korea Selatan. Pada periode ini merupakan masa dimana komunisme merupakan hal yang menakutkan bagi rakyat Korea Selatan, sehingga masyarakat selama ini memilih untuk bungkam dan diam, kritik dan bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat akan segera dilindas dan dibungkam oleh pihak pemerintah. Pada bulan November 1970, terjadi aksi bunuh diri seorang buruh bernama Chun Tae-II dengan cara membakar dirinya sendiri sebagai bagian dari protes terhadap situasi perburuhan saat itu.

Kejadian tersebut membuat para pekerja perempuan lebih sadar akan hak-hak mereka dan membawa partisipasi aktif mahasiswa dalam gerakan buruh. Serikat buruh, *Uni Garmen Chonggye*, dibentuk setelah bunuh diri pekerja tersebut. Pemerintah secara resmi mengakui serikat pekerja di bulan yang sama. Aksi protes buruh tersebut sebagai reaksi terhadap eksploitasi tenaga kerja dan perampasan hak-hak pekerja dasar. Meskipun insiden ini dipicu oleh satu kematian kejam pekerja laki-laki, hal itu menerangi kehidupan keras para pekerja perempuan terutama di pusat garmen, yang tersembunyi di balik gambaran kemakmuran pertumbuhan nasional. Aksi bunuh diri Chun Tae-II kemudian menjadi titik tolak kebangkitan gerakan serikat buruh di Korea Selatan, sejak saat itu mulai banyak pergerakan buruh yang dilakukan rakyat Korea Selatan untuk menuntut keadilan perburuhan, menuntut agar buruh diperlakukan secara manusiawi diantaranya adalah pergerakan buruh Dong-II, pergerakan buruh *YH Trades*, dan gerakan buruh Busan – Masan atau lebih dikenal dengan gerakan Bu-Ma.

Pergerakan Dong-II dimulai dengan aksi mogok makan dan mogok kerja buruh pekerja Dong-II Textile, lebih dari 400 orang buruh

Retno Ayu Oktaviani, 2018

GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

perempuan Dongil Textile menentang perusahaan mereka yang berafiliasi dengan serikat dagang dan melawan pergerakan polisi dengan aksi membuka pakaian mereka sehingga harus digiring ke stasiun polisi. Pada tahun 1979, lebih dari 200 orang buruh perempuan dari perusahaan perdagangan YH melawan penutupan pabrik dan melakukan unjuk rasa duduk untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Seorang buruh perempuan tewas terbunuh oleh kekerasan polisi dan lebih dari 100 buruh mengalami luka-luka (Matsui, 2002, Hlm. 219). Aksi buruh yang didominasi oleh buruh wanita ini disebabkan oleh kebijakan Park yang pada saat itu menerapkan kebijakan yang mempekerjakan buruh wanita secara keras dan upah mereka yang kecil tidak sebanding dengan tenaga yang telah mereka keluarkan.

Gerakan Busan – Masan merupakan gerakan lanjutan dari gerakan buruh perusahaan perdagangan YH dan juga gerakan untuk menentang kebijakan park yaitu kebijakan Yushin yang dianggap sebagai puncak dari munculnya pemerintahan yang diktator di Korea Selatan. Pemogokan buruh tersebut sering disebut sebagai perlawanan anti-diktatur dan gerakan pro-demokrasi. Perselisihan di Dong-Il dan perdagangan Y.H. memuncak selama periode krisis politik di Korea Selatan.).Gerakan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa adanya sifat pemerintah yang menolak sebuah gerakan pro-demokrasi. Gerakan represif buruh adalah target yang sangat penting untuk mengejar keadilan mereka (Mikyoungh, 2003, 89-90).

Gerakan Busan-Masan yang terjadi selama lima hari yaitu pada tanggal 16 Oktober 1979 – 20 Oktober 1979 memberikan dampak kepada masyarakat Gwangju untuk meneruskan aksi tersebut yaitu menentang adanya Konstitusi Yushin dan mengembalikan pemerintahan Korea Selatan menjadi negara Demokrasi yang sebenarnya. Pemberontakan Warga Negara Korea tersebut secara resmi diberi nama Gerakan Demokratik Gwangju. Warga mengorbankan diri mereka sendiri dalam upaya untuk mengakhiri rezim yushin dan menghalangi pengambilalihan kelompok militer baru tersebut, dengan harapan dapat mewujudkan demokrasi yang demokratis. Gerakan demokrasi gwangju menjadi titik balik gerakan demokratisasi korea, yang diwujudkan dalam konfrontasi antara orang-orang yang mencoba mempublikasikan gerakan tersebut untuk memulihkan demokrasi, dan pihak berwenang yang berusaha menekan usaha tersebut (*Presidential Truth Commission on Suspicious Deaths Republic of KOREA*, 2004, Hlm.211).

Retno Ayu Oktaviani, 2018

GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Alasan penulis ingin mengkaji Gerakan Demokratisasi di Gwangju karena gerakan tersebut menjadi tonggak penting dalam demokratisasi di Korea Selatan dalam melawan politik militer yang otokratis selain itu pada pergerakan ini masyarakat sipil yang menjadi penggerak demi mewujudkan Korea Selatan yang berdemokrasi, selain itu gerakan demokratisasi Gwangju ini terbilang berhasil dibandingkan dengan gerakan-gerakan sebelumnya sehingga peneliti merasa perlu untuk mengkaji bagaimana gerakan tersebut berlangsung sehingga mampu membawa negara Korea Selatan melakukan sebuah perubahan menuju demokrasi, Gerakan Demokratisasi Gwangju merupakan gabungan antara gerakan mahasiswa dan gerakan buruh yang ada di Gwangju. Penulis juga mengambil tahun dari awal munculnya gerakan revolusi Gwangju yaitu pada tahun 1980 dan mengambil batasan tahun hingga tujuh tahun setelahnya yaitu 1987 dan penulis mengambil judul : ***GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT: Perlawanan Rakyat menuju Korea Selatan yang Demokratis (1980-1987)***

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah utama dalam penulisan skripsi ini, yaitu *“Bagaimana peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju pada tahun 1980 terjadi dan pengaruhnya hingga 1987?”*

Untuk lebih mempermudah penelitian tersebut dibatasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Korea Selatan sebelum munculnya Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980?
2. Bagaimana peristiwa Gerakan demokratisasi Gwangju 1980 itu terjadi?
3. Bagaimana dampak ekonomi, sosial, dan politik setelah peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980 – 1987?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersamaan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan, tujuan penelitian secara umum dalam penulisan skripsi *GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT* : perlawanan rakyat menuju Korea Selatan yang demokratis (1980-1987) ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari gerakan demokratisasi Gwangju terhadap

Retno Ayu Oktaviani, 2018

GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

kondisi politik, sosial dan ekonomi di Korea Selatan. Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Korea Selatan sebelum munculnya Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980
2. Mendeskripsikan terjadinya peristiwa Gerakan demokratisasi Gwangju 1980.
3. Menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan politik setelah peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980 – 1987.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis dalam penulisan proposal skripsi ini secara khusus terutama untuk memperkaya penelitian dan penulisan sejarah khususnya dalam penulisan mengenai sejarah kawasan khususnya Korea mengenai gerakan revolusi di Korea Selatan. Maka, disusunlah manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Dengan adanya penelitian gerakan Gwangju ini diharapkan dapat memperkaya penelitian Sejarah Korea Selatan, khususnya di kota Gwangju.
2. Memberikan kajian lanjut bagi sebuah perkembangan gerakan sosial di Korea Selatan, terutama gerakan mahasiswa di Korea dari zaman ke zaman.
3. Memberikan kontribusi terhadap pengungkapan sumber-sumber baik tertulis maupun lisan mengenai gerakan masyarakat dan mahasiswa di Korea Selatan.
4. Bagi pembaca dan kalangan mahasiswa, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran apa yang terjadi pada gerakan demokratisasi Gwangju pada tahun 1980, dan menjadi alat baxa untuk dijadikan acuan bagi gerakan sosial di waktu mendatang.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan merupakan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan dari tahap awal sampai pada proses penulisannya. Hasil dari penelitian ini akan disusun ke dalam lima bab yang terdiri atas Pendahuluan, Kajian Pustakaan, Metode Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran. Adapun tujuan dan fungsi untuk memudahkan penulisan agar sistematis yaitu :

Retno Ayu Oktaviani, 2018

GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang didalamnya menguraikan mengenai penjelasan permasalahan yang diteliti dan mengapa ini penting untuk diteliti sesuai judul yang di angkat ditentukan, tujuan penelitian secara umum dalam penulisan proposal skripsi *GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT* : perlawanan rakyat menuju Korea Selatan yang demokratis (1980-1987) .Dalam bab ini dicantumkan rumusan dan batasan masalah sehingga dapat dikaji secara khusus dalam penulisan ini, sehingga penulisan ini tidak membahas permasalahan lebih luas atau keluar dari pembahasan, dalam pembahasan bab ini juga dijelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Gerakan Demokratisasi Gwangju. Pada bab akhir ini dituliskan sistematika penulisan yang akan menjadi kerangka dan pedoman penulisan skripsi ini.

Pada Bab II, Kajian pustaka bertujuan agar pembahasan yang akan diuraikan dlam skripsi ini tidak hanya bersifat naratif saja melainkan berhubungan dengan sebab akibat mengenai semua peristiwa yang berkaitan. Kajian pustaka menjelaskan pemaparan dari berbagai sumber dan literatur yang relevan dan sesuai dengan pembahasan yang akan dikaji. Sumber-sumber tersebut digunakan oleh peneliti sebagai kerangka berpikir untuk mengkaji, membahas, dan menganalisis permasalahan dalam penulisan skripsi yang berjudul ditentukan, tujuan penelitian secara umum dalam penulisan proposal skripsi *GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT* : perlawanan rakyat menuju Korea Selatan yang demokratis (1980-1987). Sumber berupa buku yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah pemilihan kesesuaian antara pembahasan dan permasalahan yang akan dikaji secara analisis deskriptif dengan beberapa buku. Dalam kajian pustaka ini dilengkapi dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Gerakan Demokratisasi Gwangju, penelitian terdahulu yang digunakan yakni berbentuk buku, skripsi dan jurnal.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan mengenai metode atau cara-cara yang akan dilaksanakan dalam melakukan penelitian. Mulai dari tahapan penelitian sampai dengan penelitian ini berakhir ini diuraikan dengan terperinci. Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode historis serta studi literatur, dan studi dokumentasi. Dalam teknik penulisannya disesuaikan dengan pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI tahun 2016 dan berdasarkan Ejaan Yang Disempurkan (EYD).

Retno Ayu Oktaviani, 2018

GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Bab IV ditentukan, tujuan penelitian secara umum dalam penulisan proposal skripsi *GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT* : Perjuangan Rakyat Korea Selatan menuju Pemerintahan yang Demokratis (1980-1987), pada dasarnya akan dituangkan semua hasil temuan dilapangan,. Penulis menganalisis serta merekonstruksi data-data serta fakta yang telah ditemukan melalui sumber dilapangan. Tentu saja pembahasan dalam bab ini dibatasi dan disesuaikan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan di awal. Seperti mengetahui latar belakang munculnya Gerakan Demokratisasi Gwangju, Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Korea Selatan sebelum munculnya Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980, bagaimana peristiwa Gerakan demokratisasi Gwangju 1980 itu terjadi, bagaimana dampak ekonomi, sosial, dan politik setelah peristiwa Gerakan Demokratisasi Gwangju 1980 – 1987.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, pada dasarnya dalam bab ini dituangkan interpretasi dari penuli setelah menganalisis hasil penelitian diatas. Pada bab ini bukan merupakan rangkuman dari penelitian melainkan hasil dari pemahaman penulis dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian.